



DEPARTEMEN ILMU POLITIK & PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

**KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA,
MASYARAKAT DAN ANTAR PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PENCEMARAN LIMBAH BATIK DI KOTA PEKALONGAN PADA
TAHUN 2015**

Ayu Cavandhes Cahyaningtyas, Teguh Yuwono, Neny Marlina
Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Batik industry is an industry that many exist in Pekalongan city, the existence of batik industry are produces waste from the process of making batik. There are two possibilities to dispose the batik waste, there are processed first and disposed directly without processing that will cause pollution. The purpose of this research are to identify the patterns of inter-governmental cooperation, and government with private and community in overcoming the problem of batik waste pollution, and to know the success rate of cooperation patterns that has been done to overcome the problem of batik waste pollution.

The method of the research is used qualitative approach with data collection technique that consist of observation, interview, and documentation. Informants in this research are head of Environmental Section and Environmental Law Arrangement of Environmental Department (DLH) Pekalongan city, Head of Pollution Control and Damage Section of DLH Pekalongan city, Head of waste pollution control section of DLH Pekalongan city, the private sector there is batik craftsmen, and the community there is environmental care community.

The result of the study indicate that 1) The pattern of inter-governmental cooperation is for funding the manufacture of IPAL, 2) The pattern of government cooperation with the privat sector (batik craftsmen) is divison the authority, that is government facilitates the construction of IPAL and provides land, whereas batik craftsmen are obliged to maintain and operate the IPAL, 3) The pattern of government cooperation with the community is the community independently provide assistance for the construction of IPAL, while the government did the coaching, supervision, assistances, and providing moral support. 4) The implementation of cooperation in overcoming the pollution of batik wate in Pekalongan city has not effectively.

Keywords : Cooperation, Pollution of Batik Waste



PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pencemaran yang saat ini sangat memprihatinkan adalah pencemaran air. Dimana air merupakan kebutuhan penting bagi manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan kesehariannya. Namun adanya sentra industri di sekitar daerah aliran sungai membuat sungai itu rawan tercemari oleh limbah yang dihasilkan dari proses industri, baik dari industri pabrik maupun industri rumah tangga. Walaupun demikian dengan banyaknya pabrik dan industri rumah tangga dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif bagi masyarakat sekitarnya. Dampak positifnya sudah tentu bahwa dengan adanya industri pabrik maupun rumah tangga ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya sentra industri ini adalah terjadinya pencemaran, baik pencemaran air, tanah dan udara. Seiring waktu maka jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri akan semakin bertambah banyak tiap harinya. Tentunya hal ini akan menjadi satu permasalahan

besar bagi pemerintah maupun masyarakat yang mana mereka harus mampu mencari solusi untuk dapat mengatasi ataupun mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh limbah, terutama limbah cair yang merupakan limbah terbesar yang dihasilkan oleh pabrik industri maupun industri rumahan, dimana limbah tersebut sering dibuang begitu saja oleh produsen kedalam sungai atau perairan yang berada di sekitar pabrik industri, yang seharusnya di proses terlebih dahulu dengan IPAL (instalasi pengolahan air limbah).

Kota Pekalongan merupakan lokasi sentra industri besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) batik yang sangat potensial untuk mendukung perekonomian lokal agar semakin berkembang dan maju. Pekalongan masih sangat jauh dari harapan untuk terbebas dari pencemaran air, dapat terlihat dari keadaan sungai disekitar daerah yang menjadi pusat industri batik seperti di kota Pekalongan sendiri yang menjadi sentra industri batik meliputi desa Jenggot, desa Banyurip, dan desa Kradenan, ketiga desa ini berada di



Kecamatan Pekalongan Selatan. Kemudian di Kecamatan Pekalongan Barat terdapat di desa Pringlangu, dan di Kecamatan Pekalongan Timur di desa Pesindon dan Kauman. Serta yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara terdapat di desa Krapyak. Industri batik yang ada ini menimbulkan dampak negatif berupa air limbah dengan volume yang besar, warna yang pekat, berbau menyengat dan memiliki suhu, keasaman (ph), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) serta total Suspended Solid (TSS) yang tinggi.

Kesadaran masyarakat mengenai kerusakan lingkungan yang ada di sekitar mereka terutama pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah cair semakin hari semakin menurun, dimana kebanyakan dari mereka menganggap bahwa limbah tersebut sudah terlanjur ada di sungai-sungai dan itu sulit untuk dihilangkan. Sehingga masyarakat atau pengusaha memproduksi batik lebih mudah bertindak semaunya untuk membuang limbahnya secara sembarangan ke sungai. Peran

pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah batik di Kota Pekalongan, namun tidak hanya itu saja peran dari pihak lain juga diperlukan seperti pada sebuah teori *good governance* dimana pemerintahan yang baik haruslah melibatkan 3 aktor dalam menjalankan pemerintahannya atau pembangunan daerah itu sendiri, actor-aktor tersebut meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kerjasama yang dilakukan antar pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah batik di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pola kerjasama Pemkot Pekalongan dengan swasta, masyarakat dalam mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah batik?
3. Apakah pola kerjasama yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan?



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan, yaitu Kepala Bagian Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Kepala Bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Kepala Sie Pengendalian Pencemaran Limbah pada DLH Kota Pekalongan, Pihak swasta yakni pengrajin batik, dan Masyarakat yakni komunitas peduli lingkungan. Sedangkan data sekunder berasal dari data dokumen, laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kerjasama Antar Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pencemaran Limbah Batik

kerjasama antar pemerintah sudah dilaksanakan dan sudah berdampak terhadap pengurangan pencemaran

limbah. Kerjasama yang dilakukan dengan pembangunan IPAL untuk mengolah limbah baik yang komunal maupun individu. Dengan pemberian dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran biaya bagi pemerintah Kota Pekalongan. Kerjasama ini juga memberikan keuntungan bagi kedua pihak, kementerian sendiri dapat mengurangi salah satu tugas atau kewajibannya dalam perlindungan lingkungan. Selain itu untuk pihak PSD, mereka mengurangi beban dalam kewajibannya dalam perlindungan sumber daya alam dari pencemaran agar sumber daya alam yang tersedia dapat berkelanjutan. Sehingga ini akan mempermudah tugas masing-masing instansi. Aktor atau pihak yang melaksanakan kerjasama dalam penanganan limbah batik ini mempunyai tujuan yang serupa atau sama, yaitu dalam pelestarian lingkungan agar berkelanjutan. Tetapi kerjasama yang dijalin pemerintah Kota Pekalongan dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak efektif, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi



dan kejelasan tugas atau wewenang dari masing-masing pemda tersebut. Menurut keterangan informan, kerjasama hanya dilaksanakan dengan bentuk koordinasi saja, selain itu pelaksanaan koordinasi tidak dilakukan dengan intensitas yang sering, selain itu juga adanya ketergantungan terhadap provinsi untuk memfasilitasi koordinasi yang dijalin, sehingga jika provinsi tidak melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak maka tidak akan dijalin sebuah koordinasi antara Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Pola Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Batik

1. Pola kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekalongan dan pihak swasta dalam hal ini adalah pengusaha batik adalah bentuk kontrak kelola. Yakni pemerintah yang membangun dan kemudian pihak pengusaha batik yang mengelola atau merawatnya. Kontrak kelola sendiri mempunyai pengertian

yaitu merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta diberi tanggungjawab untuk mengelola prasarana dan sarana milik pemerintah. Kewenangan dan tugas masing-masing sudah diketahui bahwa dana yang digunakan untuk membuat IPAL dikeluarkan oleh Pemerintah murni kemudian pihak swasta (pengrajin batik) yang merawat dan mengoperasikan alat tersebut. Namun salah satu desa yang menjadi sentra industri batik dan juga terdapat IPAL komunal disana yakni desa jenggot didapatkan kenyataan bahwa Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk membuat IPAL di desa jenggot sudah dilakukan pembangunannya namun dari pihak kelurahannya memberlakukan pungutan kepada pengrajin setempat saat dibangunnya IPAL jenggot. Disini dapat dilihat bahwa ada praktek yang tidak wajar yang dilakukan oleh pihak kelurahan karena seharusnya masyarakat tidak dibebankan biaya pembangunan IPAL karena biaya sudah ditanggung oleh pemerintah. Dan seharusnya alat tersebut digunakan dan dirawat oleh pengrajin batik di desa jenggot namun



keadaannya saat ini terbengkalai, dan penjaga yang diutus oleh DLH juga tidak melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu aliran dari masing-masing tempat pengrajin batik yang ada juga tidak tersedia dengan layak dan sesuai dengan jumlahnya, sehingga banyak aliran yang tidak mencakup beberapa pengrajin batik. Serta karena tidak ada perawatan yang baik dan benar sehingga aliran tersebut tidak dapat digunakan.

Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kerjasama pemerintah Kota Pekalongan dengan swasta dalam hal ini pengrajin batik terlaksana kurang menyeluruh, sehingga keefektifan dari kerjasama tersebut kurang berhasil. Walaupun demikian dilihat dari sisi lain dengan pihak yang sudah melakukan kerjasama dengan Pemkot, kerjasama yang terjalin juga kurang efektif karena ada beberapa oknum yang tidak mengikuti apa saja aturan yang sudah disepakati pada awal pelaksanaan terutama untuk IPAL Komunal yang melibatkan lebih dari dua (2) pengrajin batik didalamnya dan biasanya melibatkan pemerintah kelurahan.

2. Pola Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat

kerjasama yang dijalin pemerintah dengan komunitas ini sangat sederhana dimana upaya apa yang dilakukan oleh komunitas itu merupakan inisiatif dari mereka sendiri. Jika pemerintah memberikan bantuan hanya mengawasi dan menerima laporan saja, dilihat dari pihak pemerintah mereka mendapatkan untung karena mendapatkan bantuan dari komunitas karena di lapangan untuk keadaan sosial masyarakat dengan pengrajin batik mereka (pemerintah) tidak mendapat kepercayaan penuh sehingga mengalami kesulitan untuk mendekati pengrajin batik. Sehingga membutuhkan bantuan dari komunitas masyarakat ini. Selain itu pemerintah juga mempunyai binaan pramuka yang membantu untuk keperluan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan lingkungan, binaan pramuka ini ikut membantu dengan arahan dan bantuan biaya dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga berkerjasama dengan mahasiswa yang mana mereka adalah pemuda-pemudi yang masih mempunyai ideologi yang



tinggi sehingga mereka kritis terhadap keadaan lingkungan disekitarnya. Sehingga mahasiswa akan protes atau demo dengan keadaan lingkungannya yang tercemar. Melihat hal ini pemerintah mengajak mahasiswa yang salah satu dari komponen masyarakat ini untuk membantu pemerintah atau berkerjasama, hal yang dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi jumlah industri batik yang ada di Kota Pekalongan baik itu yang berskala besar maupun rumahan atau buruh. Pemerintah juga berharap dengan melakukan kerjasama dengan mahasiswa maka jika mereka mempunyai saudara atau orangtua yang berprofesi sebagai pengrajin batik maka mereka dapat memberikan masukan dan ajakan untuk melakukan produksi bersih (mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau aliran air yang lainnya).

Pemerintah bekerjasama dengan komunitas masyarakat. Dengan pembagian tugas dan wewenang, komunitas masyarakat peduli lingkungan membuat IPAL dengan dana sukarela anggota komunitas maupun dari iuran

masyarakat diluar komunitas yang kemudian pihak komunitas membuatkan IPAL dengan dana tersebut dan secara mandiri juga mencari lahan untuk dibangunnya IPAL. Sedang peran pemerintah sendiri yakni sebagai Pembina dan memberikan dukungan moril kepada komunitas.

Evaluasi Pola Kerjasama dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Batik

1. Pelaksanaan kerjasama dalam mengatasi pencemaran limbah batik.

Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tidak lain untuk meringankan dan mempermudah penanganan permasalahan pencemaran limbah batik. Tujuan tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengolahan limbah oleh para pengrajin batik sebelum limbah tersebut dibuang dengan melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan membangun IPAL komunal maupun individu yang mana ini memerlukan pengertian dan kerjasama dari pihak pengrajin batik



itu sendiri, selain itu kerjasama juga dilakukan dengan beberapa komunitas pecinta lingkungan agar mempermudah dan mempercepat tindakan untuk mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh limbah batik. Biaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dalam kategori besar tersebut memerlukan biaya tidak sedikit dan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Setiap aktor yang terlibat dalam kerjasama tersebut memiliki tujuan yang sama dan visi yang sama dengan bertitik pada pelestarian lingkungan. Keterlaksanaan tujuan dari kerjasama tersebut dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat membuahkan hasil yang diinginkan. Kerjasama yang terjalin tersebut mengandung harapan-harapan baik itu dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Harapan yang ingin dicapai salah satunya adalah peningkatan fasilitas untuk pengolahan limbah yakni dengan memperbaiki saluran pembuangan limbah dari pranggok-pranggok menuju IPAL komunal yang tersedia, penambahan jumlah saluran sehingga

dapat merata, dan perbaikan kontruksi agar laju limbah tidak tersendat. Selain itu juga diharapkan penambahan jumlah IPAL yang meningkat setiap tahunnya sehingga dapat menampung semua limbah yang dihasilkan oleh produksi batik yang ada di Kota Pekalongan.

Berjalannya kerjasama selama ini sudah membuahkan hasil yang dapat dilihat, walaupun dampak positifnya tidak terlihat jelas peningkatannya. Namun jika kita perhatikan lebih detail dan mendalam maka kita dapat melihat perubahan yang semakin baik dari keadaan sungai di kota Pekalongan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Pekalongan dengan berbagai aktor tidak terlaksana dengan baik mencapai 90%, sehingga dapat dikatakan kerjasama yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif.

2. Hambatan

Dalam pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak swasta, masyarakat maupun antar pemerintah



menghadapi beberapa kendala yakni :

1. Kurangnya dana
 2. Sikap pengrajin batik yang seolah-olah tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh hasil dari produksi mereka
 3. Kurangnya komunikasi yang baik dari Pemerintah Kota Pekalongan
 4. Bantuan pembuatan IPAL individu dari pemerintah kepada pengrajin batik harus yang sudah berbadan hukum
- Keadaan geografis Kota Pekalongan yang membuat IPAL Komunal sulit dibuat

Untuk menyelesaikan konflik atas permasalahan diatas dilakukan metode mediasi. Dengan dilakukannya mediasi ini akan membuat konflik terselesaikan dengan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam

pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Pihak DLH kota pekalongan sebagai pihak ketiga seharusnya tidak memihak kepada pihak pemerintah setempat maupun pengrajin batik. Walaupun DLH merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani permasalahan lingkungan, sehingga pengambilan keputusan dilakukan sesuai keinginan dari pengrajin dan juga disesuaikan dengan mandat pemerintah kota pekalongan yang sudah diberitahukan kepada pihak DLH. Hal ini akan menjadi sulit dilakukan karena DLH adalah instansi pemerintah.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat diperoleh beberapa simpulan:

- 1.) Pelaksanaa kerjasama antar pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah batik
 - a. Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Lingkungan Hidup) dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.



Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan pemberian dana dari pemerintah pusat yakni kementerian Lingkungan dan Kehutanan dengan pengajuan proposal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Kewajiban dari Kementerian hanya menyediakan dana kemudian kewajiban dari Pemkot Pekalongan yakni mengalokasikan dana tersebut untuk membangun IPAL sesuai dengan daerah yang sudah tertera di proposal dan juga mencari lahan untuk pembangunan IPAL. Selain itu juga melakukan negosiasi dengan pengrajin batik.

b. Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Lingkungan Hidup) dengan Kabupaten Pekalongan

Pelaksanaan kerjasama ini dengan melakukan koordinasi dari kedua belah pihak, dikarenakan pengaturan DAS meliputi dua administrative pemerintah sehingga harus ditangani oleh kedua pemerintah daerah ini. Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan koordinasi yang menggunakan pihak ketiga sebagai fasilitator yakni pihak pemerintah provinsi.

c. Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Lingkungan Hidup) dengan PSD (Pengelolaan Sumber Daya Alam)

Pelaksanaan kerjasama ini hampir sama dengan kerjasama yang dilakukan dengan kementerian yakni mengenai pemberian dana kepada Pemkot Pekalongan untuk pembuatan IPAL. Kerjasama ini dilakukan karena meringankan tanggung jawab masing-masing. Kewajiban dari Pemkot Pekalongan yakni membangun IPAL ditempat yang dirasa sangat *urgent* untuk dibuat IPAL, karena tempat tidak ditentukan sebelumnya saat pemberian dana oleh pihak PSD sehingga penetapan tempat ditentukan oleh Pemkot, serta pemberian sosialisasi kepada pengrajin batik dan mencari lahan dengan melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat atau pengrajin batik setempat.

2.) Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan swasta dan masyarakat

a. Pengusaha batik (Swasta)

Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada para pengrajin batik untuk mengolah



limbahnya dan memberikan sosialisasi. Kewajiban dari Pemkot dalam kerjasms ini adalah membangun IPAL dan mencarikan lahan yang dapat untuk didirikan IPAL tersebut. Sedangkan kewajiban dari pengrajin batik yakni merawat dan mengoperasikan IPAL yang sudah dibuat, namun dari pihak pemerintah juga menyediakan satu pegawai untuk membantu dalam menjaga dan pengoperasian IPAL tersebut.

b. Komunitas Lingkungan
(Masyarakat)

Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan dengan pola yang membebaskan komunitas untuk membangun IPAL secara mandiri. Namun dengan pengawasan pemerintah dan perijinan dari pemerintah. Selain itu juga komunitas membantu Pemkot dengan melakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung ke pengrajin batik yang mana sudah divasilitasi oleh pemerintah seperti pemberian bahan untuk sosialisasi.

c. Ulama atau Pemuka Agama
(Masyarakat)

Upaya untuk mengurangi pencemaran juga dilakukan kerjasama dengan ulama, dimana Pemkot meminta bantuan untuk selalu menyertakan larangan untuk membuang limbah sebelum diolah dalam setiap tausiyaahnya. Selain itu juga pihak ulama memberikan pengertian bahwa membuang limbah tanpa diolah dahulu itu haram, fatwa haram ini sudah resmi diturunkan.

3.) Ketercapaian tujuan dari pelaksanaan kerjasama

a. Tujuan

Kerjasama dilakukan dengan tujuan yang sama antara aktor yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Tujuan tersebut yakni mengenai kerusakan lingkungan, dimana lingkungan sungai di Kota Pekalongan harus segera dibenahi karena kondisinya yang tercemar oleh limbah yang dibuang oleh para industri yang ada. Agar dapat meningkatkan pengolahan limbah sebelum dibuang kesungai sehingga pencemaran yang ada dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

b. Hambatan

Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama baik antar pemerintah



maupun Pemkot dengan swasta dan masyarakat akan timbul berbagai hambatan yakni :

1. Kurangnya dana
2. Sikap pengrajin batik yang seolah-olah tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh hasil dari produksi mereka
3. Kurangnya komunikasi yang baik dari Pemerintah Kota Pekalongan
4. Bantuan pembuatan IPAL individu dari pemerintah kepada pengrajin batik harus yang sudah berbadan hukum
5. Keadaan geografis Kota Pekalongan yang membuat IPAL Komunal sulit dibuat

Sehingga dapat disimpulkan dengan melihat keadaan saat ini dilapangan dan berbagai masalah yang timbul maka tujuan dari pelaksanaan kerjasama ini belum tercapai, walaupun sudah ada perubahan pada sungai yang menunjukkan bahwa pencemaran oleh limbah batik sudah tidak sebanyak dahulu. Namun jika dilihat oleh orang awam yang tidak memperhatikan dengan cermat dan tidak memiliki pengetahuan tentang

pencemaran akan mengatakan tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya karena memang perubahan yang dihasilkan sedikit. Karena untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan jangka waktu yang panjang.

SARAN

- 1.) Pemerintah Kota Pekalongan lebih mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan bagaimana pembagian kewajiban dari masing-masing aktor terutama dengan pengrajin batik dan juga Pemkot lebih mensosialisasikan bagaimana mengolah limbah yang baik, cara pengoperasian IPAL dan merawatnya agar dapat dipakai lebih lama kepada pengrajin batik.
- 2.) Pemerintah kota perlu untuk mengkaji ulang dan membuat perda mengenai pengelolaan limbah batik dengan sanksi hukum yang jelas dan lebih tegas. Sehingga dapat memberikan efek jera kepada pihak yang terlibat (pengrajin batik).
- 3.) Perlu adanya perjanjian kerjasama diatas hitam atau MOU untuk dapat mengarahkan jalannya



kerjasama sesuai dengan kewajiban masing-masing aktor agar dapat berjalan lancar dan tidak ada tumpang tindih tugas atau kewajiban yang tidak dijalankan dan terbelangkai.

- 4.) Pemerintah Kota Pekalongan perlu menjalin relasi yang lebih luas lagi agar kerjasama yang dilakukan dapat ditambah. Karena mengingat pencemaran oleh limbah batik menjadi masalah yang serius atau *urgent*.
- 5.) Sebelum dilakukan sebuah kerjasama, Pemerintah Kota Pekalongan seharusnya melakukan upaya penyetaraan posisi aktor yang akan berkerjasama agar seimbang. Sehingga kepentingan dan kesadaran antara kedua belah pihak seimbang satu sama lain. Selain itu juga diperlukan pembentukan pokja dimana pemerintah sebagai fasilitator sehingga akan lebih jelas pelaksanaan kerjasamanya dan dapat berjalan sesuai yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta : Bina Aksara.
- Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Catata kuliah “Seminar proposal” Jurusan Ilmu pemerintahan Fisip Undip tanggal 31 Maret 2016 dengan Dosen Pengampu Dr.DRS. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Holloway, Richard. 2001. *Towards Financial Self Repliance : A Handbook on Resource Mobilization For Civil Society Organizations in the South*. Diterjemahkan oleh: Noviatri & Clara Hilman. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pamudji, S. 2004. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Program S2 PLOD UGM. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*. Yogyakarta : Program S2 PLOD UGM & Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.



- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo persada.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governanc*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance pemerintahan yang baik Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Setiyono, Budi. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung : Nuansa
- Subagyo, P Joko. 2011. *Metode Penelitian: dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media
- Syaodih, Ernady. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung : PT Refika Aditama
- Wardhana, Wisnu Arya. 2009. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Universitas Michigan.
- Wirawan. 2009. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Yodo, Sutarman. 2013. *Aspek Hukum Ekonomi dalam Kerjasama Daerah*. Yogyakarta : Genta publishing.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perda No 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Jurnal dan Website
- IbM Kelurahan Gulurejo (Kawasan Pengrajin Batik) Untuk Mengatasi Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Cair Batik. Yuli Pratiwi, dkk. Jurnal Teknologi Technoscintia. volume 7. No.1. *diunduh pada 12 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB*
<http://technoscintia.akprind.ac.id/full/vol7no1des2014/038-045-yuli-pratiwi.pdf>.
- Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip. Yeremias T.Keban. Volume 1, *diunduh pada 25 Mei 2016 pukul 22.08 WIB*.
http://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/03yeremiastkeban_20091014131110_22580.pdf
- <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/jenis-data-penelitian.html>
- <https://www.scribd.com/doc/98370304/Interpretasi-Data-Dan-Penarikan-Kesimpulan-Penelitian>



DEPARTEMEN ILMU POLITIK & PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

<https://m.tempo.co/read/news/2013/09/27/206517117/pengelolaan-sampah-di-surabaya-libatkan-swasta>

http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=161

<http://www.bappenas.go.id/files/.pdf>

<http://eprints.undip.ac.id/39377/diakses-pada-18-Maret-2016>

<https://digilib.uns.ac.id/> diakses pada 19 Februari 2016

<http://eprints.undip.ac.id/46805/1/diakses-pada-31-Maret-2016>

http://www.academia.edu/8274045/KERJASAMA_ANTAR_DAERAH_DENNY

<http://berita.suaramerdeka.com/blh-industri-batik-biang-pencemaran-sungai-Pekalongan/>

[http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)